|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Antara Sulteng | **Kasubaud**Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Sabtu, 14 November 2015 |
| Keterangan | : | **Bawaslu : Potensi Politik Uang Pilkada Mengarah Pascabayar** |
| Entitas | : | Palu |

Palu, (**antarasulteng.com**) - Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah Asrifai mengatakan potensi politik uang di pemilihan kepala daerah serentak sudah mengarah pada praktik pascabayar.

"Artinya coblos dulu baru dibayar. Inilah yang patut diwaspadai dan diawasi," kata Asrifai di Palu, Jumat, pada pelatihan pengawasan partisipatif pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Sulawesi Tengah.

Menurut dia, modus politik uang pascabayar tersebut berlangsung di tempat pemungutan suara dengan cara pemilih merekam dalam bentuk foto atau video surat suara yang dicoblos.

"Berdasarkan bukti foto itulah yang bersangkutan memperlihatkan kepada tim sukses bahwa dirinya benar sudah memilih. Lalu dibayar," katanya.

Kecenderungan politik uang pascabayar tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon yang bersangkutan benar sudah dipilih.

"Sudah kapok dengan politik prabayar, makanya sekarang beralih ke pascabayar, sebab kalau pascabayar belum tentu mereka dipilih sementara uang sudah diambil," katanya.

Dia mengatakan salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, pemilih dilarang membawa alat rekam ke dalam bilik suara.

Selain dalam bentuk foto/video kata Asrifai, juga patut dicurigai terjadinya pencoblosan di luar kewajaran.

"Misalnya foto calon di kertas suara diambil sebagian atau hanya nomor urutnya saja yang diambil. Ini pencoblosan di luar kewajaran sehingga bisa dicurigai jadi alat bukti politik pascabayar," katanya.

Potensi lainnya kata Asrifai, penyalahgunaan formulir C6 (undangan memilih).

Pada pilkada dan pemilu sebelumnya formulir C6 disebut undangan memilih, namun pada pilkada serentak disebut surat pemberitahuan kepada pemilih.

"Formulir C6 ini bisa saja digunakan oleh orang lain karena tidak ada foto dalam formulir itu," katanya.

Asrifai berharap seluruh elemen masyarakat khususnya media massa bersama-sama mengawasi potensi terjadinya kecurangan tersebut.

"Prinsip kita, kalau ada yang politik uang, silahkan ambil uangnya dan laporkan ke Bawaslu," katanya.